

2018

Tim Nawa Cipta

Jakarta - Indonesia

# [PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA/PEMERINTAHAN INDONESIA]

Pemindahan Ibukota Negara/Pemerintahan Indonesia telah menjadi wacana nasional dan telah didukung oleh Presiden Jokowi. Tim Nawa Cipta menyusun sebuah Analisis Kebijakan terkait, sebagai masukan dan dukungan kepada Pemerintahan Presiden Jokowi. Kajian telah disampaikan kepada Presiden Jokowi pada 20 Maret 2017, dan diperbaharui (update) pada 24 Januari 2018 untuk Bappenas.

## 1. Isu

Pemindahan ibukota negara setidaknya mempunyai tiga (3) alasan<sup>1</sup>. Pertama, alasan untuk memisahkan aktivitas Politik dan Ekonomi, antara lain negara-negara Amerika Serikat, dari New York ke Philadelphia kemudian Washington DC, Brasil, dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Belanda, ibukota resminya Amsterdam, kota pemerintahannya adalah Den Haag, India, dari Mumbai ke New Delhi, Australia, dari Sydney ke Canberra dan Darwin (wilayah Utara), Turki, dari Istanbul ke Ankara. Ke dua, alasan pendudukan negara lain, atau dalam keadaan darurat, , antara lain negara-negara Lithuania, karena pendudukan ibukota Vinilou oleh Polandia (1918 - 1940), maka ibukotanya dipindah ke Kaunas, Ibukota Perancis dipindahkan di Vichy sewaktu pendudukan Jerman, Taiwan, dari Nanjing ke Taipei, Indonesia, tercatat pernah memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Jogjakarta dan Bukit Tinggi pada masa agresi Belanda. Ke tiga, memang hendak membuat Pembangunan ibukota baru, antara lain negara-negara Malaysia, membangun Putra Jaya sebagai Komplek Perkantoran PM dan Kementerian. Yang Dipertuan Agong dan Parlemen serta Kedubes tetap di KL, dan Korea Selatan sedang merencanakan membangun ibukota ke wilayah Selatan, walaupun kantor Presiden dan Kemenlu nantinya tetap di Seoul.

Pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia telah menjadi pengalaman dan wacana sejak jaman kolonial Belanda. Pada awal abad 20, Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Strirum (1916 - 1921) membawa gagasan untuk memindahkan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Gagasannya didasarkan kepada hasil studi dari H.F. Tillema, ahli kesehatan Belanda kelahiran Groningen yang bertugas di Semarang, tentang kesehatan kota-kota di pesisir utara Jawa. Disimpulkan bahwa kota-kota di pantai utara Jawa tidak sehat untuk dijadikan sebagai kedudukan Kantor Pemerintahan, niaga, industri, pendidikan dan lain-lain. Gagasan ini gagal karena dunia depresi besar (1932) disusul perang dunia.

Pada masa Perang Kemerdekaan, tahun 1946, keamanan di Ibukota Jakarta sangat buruk karena masih banyak pasukan Sekutu AFNEI dengan pasukan Belanda (NICA) di belakangnya, dan masih banyaknya pasukan Jepang. Pada tanggal 2 Januari 1946 Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII memberikan Yogyakarta sebagai Ibukota Negara. 4 Januari Presiden Soekarno, Wakil Presiden M. Hatta dan seluruh Kabinet sampai di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerbu Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden ditangkap Belanda, dan kekuasaan diserahkan kepada Syafrudin Prawiranegara yang berada di Sumatera Barat, dan menjadikan "Sumatera Barat" sebagai Ibukota Negara. Tanggal 6 Juli 1949, Ibukota Negara kembali ke Yogyakarta, setelah Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Yogyakarta. Tanggal 17 Agustus 1950 Ibukota kembali ke Jakarta setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1957 Presiden Soekarno melalui pernyataan resmi menyatakan agar Palangkaraya menjadi "modal dan model" Ibukota Negara yang baru. Pada saat itu

dibuat kerjasama dengan Uni Soviet. Sejumlah insinyur Rusia didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut, yang dilaporkan berjalan dengan baik. Krisis ekonomi pada tahun 1960an membuat pembangunan Palangkaraya terhenti, dan pada tahun 1965 pada saat Presiden Soekarno “dilengserkan”, gagasan itu lenyap.

Pada tahun 2010 Presiden Yudhoyono membuka wacana tentang pemindahan Ibukota Negara, hanya saja gagasan tersebut berhenti pada tingkat wacana. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengangkat kembali pentingnya pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke tempat lain. Salah satu tempat yang dituju oleh Presiden Jokowi adalah Palangkaraya, dengan empat pertimbangan yang pernah disampaikan melalui media massa adalah<sup>ii</sup>:

1. Jakarta sudah terlalu padat dan tidak sesuai lagi untuk Ibukota Negara
2. Palangkaraya terdapat di Kalimantan, Pulau tanpa gunung berapi, sehingga bebas gempa
3. Posisinya di luar Jawa, sehingga menetralsir pembangunan yang Jawa-sentris
4. Tidak memerlukan dana APBN

Pada saat ini, opini publik terbelah menjadi tiga, mengikuti pendapat para pemuka masyarakat dari kalangan cerdik pandai (intelektual, akademisi, praktisi senior), yaitu pendapat *mendukung*, *menolak*, dan *kombinasi*. Matriks berikut menunjukkan peta pemikiran para cerdik pandai tersebut.

Pemuka Pendapat	Kategori	Argumen
Marco Kusumawijaya <sup>iii</sup>	Menolak	Masalah-masalah Jakarta dapat diperbaiki dengan biaya lebih kecil daripada ongkos memindahkan Ibukota jika tujuannya adalah untuk membikin pemerintahan nasional berfungsi lebih baik
Haryo Winarso <sup>iv</sup>	Menolak	Jika transportasi massal telah baik dan adanya pembatasan kendaraan pribadi maka kemacetan dapat berkurang, hal ini telah diterapkan di negara-negara lain seperti Singapura
Dorodjatun Kuntjoro-jakti <sup>v</sup>	Cenderung menolak	terlalu sederhana jika alasan untuk pemindahan ibu kota bukan hanya karena kemacetan Jakarta. Pemindahan ini termasuk permasalahan konstitusional yang tidak mudah, termasuk detail perencanaannya, di mana perlu melibatkan DPR/MPR, hingga pelaksanaannya, dan problem strategic error, termasuk kemungkinan salah pemilihan lokasi
Yayat Supriyatna <sup>vi</sup>	Kombinasi	Pemerintahan dipindahkan namun bukan dengan membangun kota baru. Jakarta tetap menjadi Ibukota Negara, namun pemerintahan mulai didistribusikan ke daerah-daerah

Andrinof Chaniago <sup>vii</sup>	Mendukung	daya dukung Pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya tak memadai lagi untuk Ibukota
M. Jehansyah Siregar <sup>viii</sup>	Mendukung	Kebijakan pemindahan Ibukota harus segera dilaksanakan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain
Sonny Harry B. Harmadi <sup>ix</sup>	Mendukung	Jabodetabek, bahkan seluruh Jawa, sudah terlalu penuh karena 55 persen penduduk Indonesia berdomisili di Jawa
Siti Zuhro <sup>x</sup>	Mendukung	pemindahan ibukota harus menjadi starting point untuk menata ulang daerah dengan mengoptimalkan otoda dan sentralisasi. Salah satunya dengan membuka cluster-cluster ekonomi baru
Riant Nugroho <sup>xi</sup>	Mendukung	Menentukan keunggulan kompetitif dan komparatif Bangsa Indonesia pada abad mendatang, namun harus mempertimbangkan empat daya dukung utama secara seimbang, yaitu <i>politik, budaya, geografis, dan keuangan</i>

Dari bentang pemahaman, pemikiran, dan pertimbangan ini, maka isu pemindahan ibukota akan dianalisis untuk dapat disampaikan rekomendasi kebijakan.

## 2. Analisis

**A**nalisis pemindahan Ibukota negara dilaksanakan dengan mempergunakan tiga metode, yaitu, pertama, metode analisis komparasi, yaitu membandingkan kebijakan relokasi Ibukota dari berbagai negara, dan melihat tingkat keberhasilannya. Kedua, metode Analisis Biaya dan Manfaat Kualitatif (*Qualitative Cost and Benefit Analysis*). Ke tiga, Analisis Kombinasi Pilihan Pemindahan. Pada analisis ini, konsep *Pemindahan Ibukota negara* disamakan dengan *Pemisahan* antara Ibukota Pemerintahan dan Ibukota Bisnis.

### 2.1. Analisis Komparatif

Daftar berikut menunjukkan negara-negara yang melakukan pemindahan Ibukota Negara dan kualitas keberhasilannya.

Tabel 1. Negara yang Memindahkan Ibukota

No	Negara	Kebijakan	Kinerja
1	Amerika Serikat	Washington, D.C sebagai Ibukota Pemerintahan/ Negara dan New York sebagai “Ibukota Bisnis”	Berhasil
2	Russia	Tahun 1712 Ibukota Moskow pindah ke St. Petersburg, kemudian pindah lagi ke Moskow tahun 1918	Berhasil
3	Kanada	Ottawa sebagai Ibukota Pemerintahan/ Negara dan Toronto sebagai “Ibukota Bisnis”	Berhasil
4	Australia	Melbourne sebagai Ibukota Pemerintahan/ Negara dan Sydney sebagai “Ibukota Bisnis”	Berhasil
5	India	Calcutta menjadi Ibukota pada tahun 1911, dan kemudian pindah ke New Delhi pada tahun 1947. Sementara itu “Ibukota Bisnis” adalah Mumbai (Bombay)	Berhasil
6	Brazil	Ibukota berpindah dari Salvador, kemudian ke Rio de Janeiro, dan sejak 1961 di Brasilia. Rio de Janeiro tetap menjadi “Ibukota Bisnis”	Berhasil
7	Belize	Tahun 1961 Topan Hattie menghancurkan Belize City, tahun 1970 Ibukota pindah ke Belmopan	Berhasil
8	Polandia	Dari Krakow ke Warsawa	Berhasil
9	Italia	Dari Turin, Florence, Salerno, kini Roma	Berhasil
10	Yunani	Tahun 1834 dari Nafplion ke Athena	Berhasil
11	Jerman	Dari Berlin, kemudian tahun 1949 ke Bonn, dan tahun 1990 ke Berlin	Berhasil
12	Saudi Arabia	Pada tahun 1818 memindahkan dari Diriyah ke Riyadh	Berhasil
13	Finlandia	Tahun 1812 dari Turku ke Helsinki	Berhasil
14	Tanzania	Tahun 1970 memindahkan Ibukota dari Dar es Salaam ke Dodoma	Gagal
15	Pantai Gading	Tahun 1983 Ibukota Negara dipindahkan dari Abidjan ke Yamoussoukro <sup>xii</sup>	Gagal
16	Nigeria	Tahun 1991 Ibukota dipindahkan dari Lagos ke Abuja <sup>xiii</sup> . Lagos tetap menjadi “Ibukota Bisnis”	Relatif berhasil
17	Kazakhstan	Tahun 1991 Ibukotanya adalah Almaty, dan Desember 1997 pindah ke Astana (sebelumnya bernama Aqmola) <sup>xiv</sup>	Relatif berhasil
18	Myanmar	Pada November 2005 Ibukota Rangoon/Yangon pindah ke Naypyidaw <sup>xv</sup>	Relatif berhasil
19	Sudan Selatan	September 2011 Ibukota Juba pindah ke Ramciel	Dalam proses penyelesaian
20	Iran	Dari Esfahan and Shiraz pindah ke Teheran, dan kini berencana untuk memindahkan ke Qom atau	Dalam proses

		Isfahan <sup>xvi</sup>	
21	Sri Lanka	Parlemen berkantor di Sri Jayawardenapura Kotte, tetapi Pemerintah berkantor di Kolombo	Kurang berhasil
22	Malaysia	Tahun 1999 memindahkan Ibukota Pemerintahan ke Putra Jaya, dan menjadikan Kuala Lumpur sebagai Ibukota Negara	
23	Thailand	Dari Ayutthaya ke Bangkok	Kurang berhasil
24	Vietnam	Dari Hue ke Hanoi atau Ho Chi Min City	Belum dapat dinilai
25	Pakistan	Pada tahun 1950an pindah dari Karachi ke Rawalpindi, kemudian tahun 1960an pindah ke Islamabad	Kurang berhasil
26	Laos	Pada tahun 1975 pindah dari Luang Prabang ke Vientiane	Kurang berhasil
27	Turkey	Pada tahun 1923 memindahkan Istanbul ke Ankara	Tidak bisa dinilai <sup>xvii</sup>
28	Filipina	Pada tahun 1976 memindahkan Quezon City ke Manila	Kurang berhasil
30	Japan	Pada tahun 1868 memindahkan dari Kyoto ke Tokyo	Tidak bisa dinilai
31	Oman	Pada tahun 1970 memindahkan dari Salalah ke Muscat	Relatif berhasil
32	Bhutan	Pada tahun 1907 memindahkan dari Punakha ke Thimpu	Kurang berhasil
33	Uzbekistan	Pada tahun 1930 memindahkan dari Samarkand ke Tashkent	Tidak bisa dinilai
34	Afghanistan	Pada tahun 1776 memindahkan dari Kandahar ke Kabul	Tidak bisa dinilai
35	Serbia	Dari Kragujevac ke Belgrade	Tidak bisa dinilai
36	Albania	Dari Durres ke Tirana	Tidak bisa dinilai
37	Lithuania	Tahun 1939 pindah dari Kaunas ke Vilnius	Tidak bisa dinilai
38	Malta	Dari Mdina ke Valetta	Tidak bisa dinilai
39	Montenegro	Tahun 1946 dari Cetinje ke Podgorica	Tidak bisa dinilai
40	Ghana	Tahun 1877 dari Cape Coast ke Accra	Tidak bisa dinilai
41	Botswana	Tahun 1965 dari Mafeking ke Gaborone	Gagal
42	Guinea Bissau	Tahun 1974 dari Madina do Boe ke Bissau	Gagal

43	Cape Verde	Tahun 1858 dari Cidade Velha ke Praia	Tidak bisa dinilai
44	Togo	Tahun 1897 dari Aneho ke Lome	Tidak bisa dinilai
45	Malawi	Tahun 1974 dari Zomba ke Lilongwe	Gagal
46	Trinidad and Tobago	Tahun 1784 dari San Jose ke Port of Spain	Tidak bisa dinilai
47	Jamaica	Tahun 1872 dari Port Royal to Spanish Town ke Kingston	Tidak bisa dinilai
48	Barbados	Tahun 1628 dari Jamestown ke Bridgetown	Tidak bisa dinilai
49	Honduras	Tahun 1888 dari Comayagua ke Tegucigalpa	Tidak bisa dinilai
50	New Zealand	Tahun 1865 dari Auckland ke Wellington	Tidak bisa dinilai
51	Micronesia	Tahun 1989 dari Kolonia ke Palikir	Gagal
52	Palau	Tahun 2006 dari Koror ke Ngerulmud	Gagal
53	Indonesia	Dari Jakarta ke Yogyakarta, ke Bukittinngi, ke Bireun, dan kembali ke Jakarta	Tidak bisa dinilai

Dari analisis komparasi di atas, negara-negara yang memindahkan Ibukota Negara dan yang memisahkan antara “Ibukota Pemerintahan” dan “Ibukota Bisnis” cenderung berhasil. Keberhasilan dinilai dari tiga kriteria:

1. Terbentuknya ekosistem fisik pemerintahan yang lebih baik
2. Keseimbangan perkembangan sosial, ekonomi, politik antar kawasan dengan menghasilkan keseimbangan antar kawasan
3. Kestinambungan keunggulan kompetitif dari negara/bangsa bersangkutan secara global

Dengan demikian, secara relatif dapat dikatakan, rencana untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke kota lain mempunyai potensi keberhasilan, dengan mempertimbangkan tiga kriteria keberhasilan yang disebutkan di atas.

## 2.2. Analisis Biaya dan Manfaat secara Kualitatif

Pada tabel berikut disampaikan pilihan-pilihan kebijakan antara *status quo* dan *pemindahan* dengan skor memanfaatkan metode *biaya-manfaat-kualitatif*.

Tabel 2. Analisis Biaya dan Manfaat secara Kualitatif

Pilihan Kebijakan	Biaya	Manfaat	Manfaat/ Biaya
Status Quo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penurunan kualitas keibukotaan Jakarta secara pasti dalam jangka pendek (10 tahun)</li> <li>▪ Penurunan kualitas pemerintahan secara pasti dalam jangka menengah (25 tahun)</li> <li>▪ Penurunan kualitas daya saing Indonesia secara pasti dalam jangka panjang (50 tahun)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada kebutuhan biaya baru</li> <li>▪ Tidak ada guncangan baru secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi</li> </ul>	< 1
Pemindahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya baru untuk perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian yang bisa saja cukup besar dalam jangka pendek (5 tahun)</li> <li>▪ Terdapat guncangan sosial, budaya, dan politik yang relatif tinggi dalam jangka pendek (5 tahun)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru Indonesia yang lebih termanajemeni</li> <li>▪ Peningkatan kualitas pemerintahan secara pasti dalam jangka menengah (25 tahun)</li> <li>▪ Peningkatan kualitas daya saing Indonesia secara pasti dalam jangka panjang (50 tahun)</li> </ul>	> 1

Dari analisis biaya dan manfaat kualitatif secara sederhana di atas, dapat disimpulkan bahwa pilihan kebijakan *status quo* mempunyai skor <1, sementara pilihan kebijakan memindahkan Ibukota mempunyai skor >1.

### 2.3. Analisis Kombinasi Pilihan Pemindahan

Pada analisis kombinasi pilihan, maka penilaian dilakukan pada empat parameter utama dengan urutan sesuai dengan kekuatan kontribusi dari tertinggi ke terendah sebagai berikut:

1. Kekuatan budaya lokasi
2. Keamanan dari ancaman bencana alam
3. Keamanan dari ancaman sosial
4. Luas lahan
5. Kekuatan ekonomi
6. Potensi ekonomi
7. Kestrategisan lokasi secara geografis secara internal dan eksternal



## 8. Kesiapan infrastruktur

Berikut ini disampaikan analisis pemindahan secara makro dalam konteks pulau.

Tabel 3. analisis pemindahan secara makro dalam konteks pulau

Pulau	Keuntungan	Ancaman	Skor <sup>xviii</sup>
Jawa	Budaya kuat dan tinggi	Rawan bencana sosial dan alam	92
	Kekuatan ekonomi	Kepadatan	
	Kesiapan Infrastruktur pendukung	lokasi geografis kurang strategik	
Sumatera	Lahan luas	Infrastruktur lemah	87
	Potensi ekonomi besar	Rawan bencana alam	
	Lokasi geografis strategik	Kekuatan budaya terbatas	
Kalimantan	Lahan sangat luas	Kekuatan budaya sangat terbatas	91
	Potensi ekonomi sangat besar	Infrastruktur lemah	
	Lokasi geografis strategik	Rawan bencana sosial	
	Aman bencana alam	-	
Sulawesi	Lahan relatif luas	lokasi geografis kurang strategik	79
	Potensi ekonomi relatif besar	Infrastruktur lemah	
	Lokasi geografis strategik	Rawan bencana alam	
	-	Kekuatan budaya terbatas	
Papua	Lahan sangat luas	lokasi geografis kurang strategik	71
	Potensi ekonomi sangat besar	Infrastruktur lemah	
	-	Rawan bencana alam dan sosial	
	-	Kekuatan budaya terbatas	

Dari analisis tersebut, nampak bahwa pilihan pemindahan terbatas pada dua pulau, yaitu Jawa dan Kalimantan. Jawa relatif mempunyai keunggulan tipis dibanding Kalimantan. Untuk itu, dilanjutkan dengan analisis kombinasi lanjutan dengan pendekatan posisi strategik secara geografis terhadap internal dan eksternal dengan skor strategik (SS) sekaligus dikaitkan dengan kondisi fisik secara relatif sebagai berikut:

Tabel 3. analisis kombinasi lanjutan dengan pendekatan posis strategik secara geografis terhadap internal dan eksternal dengan skor strategik (SS) sekaligus dikaitkan dengan kondisi fisik

Pulau	Lokasi	SS Internal <sup>xix</sup>	SS Eksternal <sup>xx</sup>	Total Skor
Jawa	Pantai Utara kawasan Barat	78	62	134
	Pantai Utara kawasan Tengah	91	93	184
	Pantai Utara kawasan Timur	82	81	163
	Pantai Selatan kawasan Barat	37	37	74
	Pantai Selatan kawasan Tengah	35	35	70
	Pantai Selatan kawasan Timur	36	36	76
	Pantai Timur	32	32	64
	Pantai Barat	51	51	102
	Tengah Daratan kawasan Barat	69	79	148
	Tengah Daratan kawasan Tengah	76	78	154
	Tengah Daratan kawasan Timur	81	72	153
Kalimantan	Pantai Selatan	90	81	171
	Pantai Timur	76	91	167
	Pantai Barat	82	90	172
	Tengah Daratan kawasan Barat	88	91	179
	Tengah Daratan kawasan Tengah	92	91	183
	Tengah Daratan kawasan Timur	90	89	179
	Tengah Daratan kawasan Selatan	91	81	172

Dari analisis sederhana di atas, nampak bahwa dua pilhan terbaik adalah *Jawa Pantai Utara Kawasan tengah* dan *Kalimantan Daratan Kawasam Tengah*.

### 3. Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan adalah bersifat *generik* atau *umum*, mengingat *keterbatasan analisis, data, dan waktu analisis*. Adapun rekomendasi diberikan adalah:

1. Dibuat kebijakan Pemindahan Ibukota Negara, namun perlu dibuat kajian oleh Tim Khusus yang bersifat *rahasia* dan berada *langsung di bawah Presiden*, dan bukan oleh salah satu atau kombinasi *Kementerian*. Tim disarankan terdiri dari:
  - a. Ahli Tata Kota
  - b. Ahli Lingkungan
  - c. Ahli Ekonomi
  - d. Ahli Pemerintahan
  - e. Ahli Kebijakan

- f. Ahli Hukum
  - g. Ahli Kebudayaan/Antropologi
  - h. Ahli Statistik
  - i. Ahli Transportasi
  - j. Ahli Arsitektur/Teknik Spasial Wilayah
  - k. Ahli Politik Internasional
  - l. Ahli Kedayasaingan
  - m. Ahli Manajemen
  - n. Ahli Rekayasa Teknologi
  - o. Ahli Psikologi Massa
2. Lokasi disarankan adalah *Jawa Pantai Utara Kawasan Tengah* dan *Kalimantan Daratan Kawasan Tengah*, dengan ancar-ancar lokasi sebagai berikut:



3. Rancangan Implementasi yang disarankan adalah:
- a. Presiden dan Kabinet pindah ke Ibukota baru
  - b. MPR (DPR dan DPD) pindah ke Ibukota baru
  - c. BPK, MA, MK, tetap pada tempat sebelumnya
  - d. Ibukota baru hanya untuk *kegiatan politik, administrasi negara, dan pariwisata tujuan khusus*
  - e. Dimulai dari pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan perumahan pejabat dan pegawai pemerintahan dengan metode *ruislag* gedung-gedung yang ada, dengan catatan semua biaya pembangunan baru dan pemindahan *tuntas* hanya dari hasil *ruislag*, atau tidak dari APBN
  - f. Jika dikehendaki *pilihan ke dua* sebagai *opsi*, maka agenda penting dilakukan adalah *penguatan budaya* di kawasan tersebut.
  - g. Implementasi kebijakan *perlu* dilaksanakan dengan tiga prinsip:
    - 1) *Smart*
    - 2) *Speed*
    - 3) *Secrecy*

- 
- <sup>i</sup> Antara lain dikemukakan Budi Riyanto, 2016, “Pemindahan Ibukota”, Seminar Revolusi Mental - Pohon Ajaib, *PEMIMPIN & Negara*, Jakarta, 8 Oktober 2016
- <sup>ii</sup> <https://www.merdeka.com/uang/4-alasan-presiden-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-palangkaraya.html>
- <sup>iii</sup> Direktur Rujak Center for Urban Studies
- <sup>iv</sup> Planolog Institut Teknologi Bandung
- <sup>v</sup> Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
- <sup>vi</sup> Planolog dari Universitas Trisakti
- <sup>vii</sup> Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- <sup>viii</sup> peneliti di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung
- <sup>ix</sup> Pakar demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- <sup>x</sup> Peneliti LIPI
- <sup>xi</sup> Pengajar Kebijakan Publik, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
- <sup>xii</sup> Yamoussoukro adalah kota kelahiran President Pantai Gading saat itu, Felix Houphouet-Boigny
- <sup>xiii</sup> Tidak rentan dengan perubahan iklim tropik yang ekstrem.
- <sup>xiv</sup> Lokasi baru lebih aman dari ancaman bencana alam, khususnya gempa bumi.
- <sup>xv</sup> Lebih aman dari bencana dan invasi musuh
- <sup>xvi</sup> Lebih aman dari bencana dan invasi musuh
- <sup>xvii</sup> Tidak bisa dinilai dengan dua alasan: tidak ada data dan tidak ada pemindahan sebagaimana dimaksud.
- <sup>xviii</sup> Skor diukur pada bentang 1 – 100. Penilaian bersifat *proksi* dan *indikatif*. Belum dapat dipergunakan untuk pembenaran final, karena masih memerlukan metode yang lebih detil, komprehensif, dan mendalam.
- <sup>xix</sup> Skor diukur pada bentang 1 – 100. Penilaian bersifat *proksi* dan *indikatif*. Belum dapat dipergunakan untuk pembenaran final, karena masih memerlukan metode yang lebih detil, komprehensif, dan mendalam.
- <sup>xx</sup> Skor diukur pada bentang 1 – 100. Penilaian bersifat *proksi* dan *indikatif*. Belum dapat dipergunakan untuk pembenaran final, karena masih memerlukan metode yang lebih detil, komprehensif, dan mendalam.